



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban TAHUN 2025

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, berkah, petunjuk dan perlindungan-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 urusan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat kami susun.

Dalam LKPJ ini disampaikan berbagai aspek laporan pertanggungjawaban mencakup penjelasan pelaksanaan program/ kegiatan, pendapatan, keberhasilan yang telah dicapai, serta hambatan-hambatan yang dijumpai dan upaya pemecahan masalahnya. Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 70 ayat 3 dan Pasal 71 ayat 2 perihal laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilakukan satu kali dalam satu tahun. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan dalam urusan keuangan di Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025. Selain itu, dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini disusun untuk memberikan bahan pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2025 ini merupakan dokumen yang akan menjadi relevan untuk mencapai visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sehingga kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah kedepannya bisa lebih optimal.

KEPALA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN



NIP. 19700608 200212 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	6
2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	6
2.2 Kebijakan Strategis	26
2.3 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan atas LKPJ Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2025	27
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	28
3.1 Identifikasi tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintahan tingkat di atasnya	28
3.2 Identifikasi tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan Pemerintahan tingkat dibawahnya	28
BAB IV PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran (LKPJ ATA) Tahun 2025 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), yang selanjutnya diusulkan menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dari Pemerintah Daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama-sama untuk menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

LKPJ ATA 2025 Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah disusun berdasarkan Kebijakan anggaran yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dan perencanaan tahunan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

Berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka disusunlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah tahun 2025.

Dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tersebut diharapkan, dapat dilihat dan diukur kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah selama satu tahun anggaran yang meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, laporan ini diharapkan mampu menyajikan pelaporan yang akuntabel, terbuka, transparan dan berlandaskan hukum, sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan profesional.

1.2. Dasar Hukum

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Tahun 2016;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dalam mengelola sumber daya dan kemampuan manajerial secara efektif dan efisien yang sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan tujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

2. Sebagai evaluasi dan upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam rencana strategis BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026 mengacu pada Visi Kepala Daerah tahun 2021 – 2026 yaitu:

**Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat
Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional**

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mengacu pada misi pertama pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut **Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.** Adapun Tujuan Strategis BPKPAD adalah: **Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Kinerja** dengan Sasaran Strategis:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKPAD
3. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Untuk mewujudkan Capaian Sasaran Strategis diatas maka Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah didukung oleh 4 Program, 13 kegiatan dan 62 Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (IKU Bupati) Tahun 2025, tersaji pada tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan (IKU Bupati) Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6
1.	Penilaian LKD (Opini BPK)	Opini	WTP	WTP	Pada tahun 2025, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6
					<p>Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan Nomor 26.A/LHP. XVIII/PDG/05/2025 dan LHP Nomor 26.B/LHP. XVIII/PDG/05/2025 bertanggal 19 Mei 2025 dan Surat Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Nomor 56/S-HP/XVIII.PDG/05/2025 yang memuat Opini Wajar Tanpa Pengecualian tanggal 22 Mei 2025</p>

Gambar 2.1
Pernyataan dan Dokumentasi WTP Tahun 2024



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**
Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 22 Mei 2025

Nomor : 56/S-HP/XVIII.PDG/05/2025
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Kepada Yth.
Bupati Pesisir Selatan
di
Padang

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan dijabarkan untuk memberikan opini atas keajaiban Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.


- Opini atas Laporan Keuangan**
Wajar Tanpa Pengecualian
- Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

Untuk jelang kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 26.A/LHP/XVIII.PDG/05/2025 dan Nomor 26.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 bertanggal 19 Mei 2025.

Sesuai Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jwajiban atau penjelasan kepada DPR tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Pesisir Selatan, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BPK Perwakilan,

Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA, CPA, RMA



Gambar 2.2



Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, tersaji pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program Penujjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
				Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	KEUANGAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025	5	6	7	8	9	10	11	12
				Program Penujjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	34	100%	64.652.100	64.286.230	99,43
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	55	100%	34.307.369.821	14.239.561.675	41,51
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	100%	237.250.000	237.250.000	100,00
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	1	100%	27.541.000	27.458.800	99,70
				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
				418.909.092							
				373.629.864							
				89,19							

N o	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	100%	52.758.558	45.130.690	85,54
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	20	100%	50.494.201	41.116.186	81,43
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	100%	34.658.900	33.537.980	96,77
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	50	100%	13.600.000	8.600.000	63,24
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	100%	20.090.000	18.992.500	94,54
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1000	100%	234.107.433	213.098.508	91,03
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	2200	100%	13.200.000	13.154.000	99,65
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					181.511.000	157.509.000	86,78
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	19	100%	181.511.000	157.509.000	86,78

N o	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
				Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah					688.164.180	631.612.477	91,78
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	100%	490.992.000	444.032.375	90,44
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	100%	197.172.180	187.580.102	95,14
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah					981.667.700	885.597.117	90,21
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1 Unit	100%	41.701.700	41.309.593	99,06
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	33	100%	170.180.000	152.335.934	89,51
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	120	100%	149.950.000	135.887.150	90,62
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	unit	1	100%	619.836.000	556.064.440	89,71
				1. Peraturan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah				274.536.011.349	258.486.003.755	94,15
2				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					1.745.513.158	1.661.738.243	95,20

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 31 Desember 2024;	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	dokumen	2	100%	78.506.312	76.514.961	97,46
			2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 tahun 2024 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 31 Desember 2024	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	dokumen dokumen	2 63	100% 100%	52.833.996 35.903.449	52.470.495 35.150.146	99,31 97,90

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Keputusan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 15 Oktober 2025	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	dokumen	63	100%	38.865.257	38.328.648	98,62
			4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan TA 2025 tanggal 15 Oktober 2025;	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	dokumen	63	100%	123.858.234	123.742.800	99,91

N	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase	
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	dokumen	63	100%	77.436.990	76.391.703	98,65	
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	dokumen	2	100%	446.557.636	423.740.980	94,89	
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	dokumen	2	100%	562.525.259	550.766.194	97,91	
				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	dokumen	2	100%	214.999.892	191.495.516	89,07	
				Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	100	100%	114.026.133	93.136.800	81,68	
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	dokumen	444	100%	59.653.264	58.343.900	97,81
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					398.650.706	392.697.364	98,51	

N o	Urusan Pemerintahan	Perangkat Pelaksana Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Perse ntase
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	dokumen	658	100%	57.610.698	54.403.764	94,43
				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	134	100%	281.386.744	279.949.700	99,49
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban.	dokumen	492	100%	139.068.214	129.370.857	93,03
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	dokumen	1	100%	89.980.342	80.742.025	89,73
									450.201.710	397.870.025	88,38

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	dokumen	2	100%	100.804.744	99.680.566	98,88
				Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	dokumen	5	100%	36.944.430	29.332.361	79,40
				Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	dokumen	1	100%	6.003.432	5.776.466	96,22
				Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	dokumen	2	100%	45.424.082	40.344.850	88,82
				Pembinaan Akuntansi, Laporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Laporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	100	100%	31.976.466	12.622.900	39,48

N	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Perseentase	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penujangan Urusan Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah					271.839.851.448	255.944.093.123		94,15
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	laporan	12	100%	259.343.607.316	248.002.012.952		95,63
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	laporan	12	100%	9.302.500.053	6.103.007.270		65,61
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	laporan	1	100%	3.193.744.079	1.839.072.901		57,58
				Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah					101.794.327	89.605.000		88,03
				Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah	dokumen	12	100%	101.794.327	89.605.000		88,03
				Program Pengelolaan Barang Miik Daerah					935.182.462	862.941.866		92,28
				Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	dokumen	1	100%	53.244.190	44.747.800		84,04
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Miik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Miik Daerah	dokumen	2	100%	34.843.440	34.603.610		99,31
				Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Miik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Miik Daerah	dokumen	2	100%	28.988.732	20.891.571		72,07
				Penatausahaan Barang Miik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Miik Daerah	laporan	41	100%	591.452.640	585.033.095		98,91

N	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	laporan	1	100%	59.445.032	46.631.060	78,44
				Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	laporan	1	100%	6.449.466	3.780.320	58,61
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penunahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penunahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	dokumen	3	100%	44.594.390	31.715.850	71,12
				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	laporan	41	100%	18.908.212	16.958.735	89,69
				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	laporan	1	100%	45.105.614	44.772.292	99,26
				Pembinaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kab/Kota	Orang	70	100%	52.150.746	33.807.533	64,83
4				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.526.228.068	1.472.620.767	96,49
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.526.228.068	1.472.620.767	96,49
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	dokumen	2	100%	12.138.680	11.779.222	97,04

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	dokumen	8	100%	65.181.800	61.020.300	93,62
				Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan ¹ Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	2	100%	39.513.400	27.828.993	70,43
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	unit	1	100%	359.790.750	352.788.450	98,05
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	laporan	12	100%	131.667.980	124.531.352	94,58
				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJO P nya	Objek Pajak	5000	100%	49.070.650	48.843.469	99,54
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	layanan	800	100%	30.000.000	29.756.762	99,19
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	dokumen	160000	100%	239.629.400	239.331.958	99,88

N o	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Perse ntase
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	dokumen	175000	100%	173.897.600	161.284.431	92,75
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	dokumen	50	100%	32.088.348	31.337.150	97,66
				Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	dokumen	4	100%	161.479.450	156.760.222	97,08
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	4	100%	162.122.300	160.684.450	99,11
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	laporan	4	100%	69.647.710	66.674.008	95,73
TOTAL									313.904.486.772	277.438.471.551	88,38

Berdasarkan tabel 2.2 tentang capaian pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 diatas, maka dapat dipaparkan analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana berikut ini:

a. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas meliputi Kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban keuangan daerah. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan:

I. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan output Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Rencana Anggaran Darah Tepat Waktu
2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan output Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam pengelolaan perbendaharaan daerah
3. Kegiatan Koordisasi dan Pengelolaan dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan output persentase jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti atas Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
4. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan keuangan Daerah, dengan output Persentase tertibnya pengelolaan penyaluran belanja bantuan keuangan, darurat mendesak dan dana bagi hasil pajak
5. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, dengan output Cakupan Implementasi pengelolaan keuangan Perangkat Daerah berbasis IT

II. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan output terlaksananya persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam penatausahaan BMD

Adapun indikator dari sasaran pertama ini meliputi :

1. Opini BPK “WTP”

Dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK kepada setiap daerah, BPK mengeluarkan pernyataan berupa “Opini”. Opini merupakan pernyataan atau pendapat profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini ini didasarkan pada kriteria (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan (4) efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Indeks Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal pemerintah daerah merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah tanpa bantuan dari pihak lain termasuk dari pemerintah pusat. Hunter (1977) menyatakan bahwa esensi dari kemandirian fiskal daerah adalah adanya kebebasan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan berbagai jenis penerimaan dan belanja sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga pemerintah daerah memiliki daya ungkit untuk meningkatkan proporsi pendapatannya dan menghasilkan pengeluaran yang lebih tinggi daripada di tingkat pusat. Dengan adanya otonomi daerah, yang di dalamnya terdapat pelimpahan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah, maka daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerahnya untuk memberikan pelayanan yang optimal dan pembangunan daerahnya. Salah satu metode pengukuran kemandirian fiskal daerah adalah Fiscal Autonomy Indeks (FAI) atau Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) yang dikembangkan oleh Hunter (1977).

“Formula IKF :

$$IKF = 1 - \frac{DAU + DAK + \text{Penerimaan Pinjaman Daerah} + DBH}{PAD + DAU + DAK + \text{Penerimaan Pinjaman Daerah} + DBH}$$

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan:

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan output terlaksananya persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah

b. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja

Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja ditandai dengan meningkatnya integritas birokrasi; meningkatkan kapasitas dan independensi pengawasan, meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah; dan meningkatnya transparansi proses pengadaan barang/jasa. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja lingkup BPKPAD.
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan output Terlaksananya administrasi keuangan lingkup BPKPAD.
 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan output Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan output Terlaksananya pengadaan barang milik daerah lingkup BPKPAD.
 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan lingkup BPKPAD.
 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan output Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah lingkup BPKPAD.

Adapun indikator dari sasaran pertama ini meliputi :

a. Hasil Penilaian AKIP BPKPAD

Hasil penilaian akuntabilitas kinerja BPKPAD meliputi perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja BPKPAD adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

c. Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah

Pada Tahun 2025, melalui kegiatan Innovative Government Award (IGA) yang di selenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025, BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan telah menginputkan inovasi sebanyak 1 Inovasi yaitu:

“Sistim Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADDEH) dengan bentuk inovasi pelayanan publik”

Untuk menunjang sasaran itu terdapat indikator kinerja yang ditetapkan diantaranya :

a. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi menjadi harapan publik ketika reformasi birokrasi tidak optimal sebab inovasi menjadi instrumen untuk meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2025 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi.

Pada dasarnya Inovasi Daerah merupakan sarana Pemerintah untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang lebih produktif, efisien dan efektif. Pemerintah daerah harus senantiasa melakukan inovasi atau pembaharuan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah. Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya perbaikan kualitas pelayanan.

Inovasi tidak terjadi secara insidental akan tetapi dapat dirunut melalui proses yang terjadi sehingga dapat menjadi sebuah kerangka kerja untuk melakukan inovasi. Dalam inovasi terdapat fase inisiasi, implementasi dan difusi yang masing-masing memiliki episode tersendiri. Selain itu dalam masing-masing fase dilakukan berbagai strategi baik formal maupun informal. Selain itu inovasi yang berhasil merupakan sebagian kecil dari keseluruhan inovasi yang kebanyakan mengalami kegagalan sehingga harus diketahui proses yang terjadi dibalik inovasi.

Inovasi OPD di BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan, semua telah disertai dokumen pendukung / dokumen inovasi yang lengkap yang menjadi dokumen legalitas untuk penilaian kematangan sebuah Inovasi daerah. Berdasarkan hasil pelaporan inovasi daerah kabupaten Pesisir Selatan melalui Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025 pada Lampiran Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 500.10.30/47 /Bapedalitbang/2025 Tanggal : 26 September 2025 diperoleh:

Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan yang diperoleh pada tahun 2025 adalah sebesar 99.

Adapun permasalahan dan solusi yang terdapat pada pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. PERMASALAHAN

Dalam Pelaksanaan Program/kegiatan/Subkegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah tidak ada permasalahan yang berarti. Namun demikian, dari hasil pengendalian dan evaluasi memperlihatkan permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu, antara lain belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

Adapun beberapa subkegiatan yang memiliki serapan anggaran yang rendah dapat dijelaskan sebagai berikut

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan persentase realisasi keuangannya sebesar 41,51%, sub kegiatan ini merupakan dana earmark yang terdiri dari Gaji ASN Lingkup BPKPAD dan TPP, Gaji PPPK sebanyak 426 orang dengan sumber dana DAU PPPK . Sesuai ketentuan Pasal 23 Permendagri No 6 Tahun 2021 tentang Gaji PPPK bahwa gaji PPPK dibayarkan setelah menandatangani perjanjian kerja, diterbitkan keputusan pengangkatan PPPK dan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT. Pencairan Gaji PPPK Formasi 2025 yang diangkat di Tahun 2025 baru mulai dibayarkan pada bulan September 2025 sehingga untuk Gaji P3K terealisasi selama 4 bulan

2. SOLUSI

Beberapa Solusi yang di sarankan sebagai tindak lanjut dari Permasalahan yang terdapat pada pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan/Sekretaris dan Seluruh Kepala Bidang perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan rencana kerja dapat segera diatasi.
2. Sekretaris dan Seluruh Kepala Bidang dan Kasubid agar meningkatkan perhatian terhadap data capaian kinerja setiap triwulan sebagai bahan analisis pengambilan kebijakan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Agar Sekretaris dan Kepala bidang lebih serius dalam menyusun, menganalisa dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap triwulan.
4. Meningkatkan Koordinasi dengan PD pengampu terkait jadwal penyaluran dana earmark.

2.2. Kebijakan Strategis

Adapun Kebijakan strategis pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 disajikan pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kebijakan Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Menetapkan APBD Kabupaten Pesisir Selatan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025	Pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara Negara didaerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.
2	Menyusun Peraturan Bupati Terkait : 1. Standar Harga Satuan 2. Penetapan daftar RKBMD tahun anggaran 2025	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Sebagai Pedoman Penyusunan APBD
3	Menyusun Pertanggungjawaban	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan	untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Pelaksanaan APBD	Keuangan Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 3. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

2.3 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Sumatera Barat atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:100.1.4.2/26/Set.DPRD/2025 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, Tidak Ada rekomendasi untuk Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.4
Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Akhir Tahun Anggaran 2024

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	-	-	-

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
DAN PENUGASAN

3.1. Identifikasi tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintahan tingkat di atasnya

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun anggaran 2025 tidak melaksanakan tugas pembantuan dan penugasan dari Pemerintahan tingkat di atasnya.

3.2. Identifikasi tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan Pemerintahan tingkat dibawahnya

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun anggaran 2025 tidak memberikan tugas pembantuan dan penugasan pada Pemerintahan tingkat dibawahnya.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan. Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berjalan sudah optimal.

Dengan hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 ini harapannya kedepan akan lebih baik lagi dibanding tahun sebelumnya. Dengan demikian LKPJ ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan gambaran capaian kinerja yang sudah diperjanjikan sebelumnya sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan


SUHANDRI, SE., MM
NIP. 19700608 200212 1 003